BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang memungkinkan dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki secara optimal. Yang dimaksud potensi di sini adalah kemampuan setiap manusia dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan guna menghadapi tantangan kehidupan dalam proses pembangun pada umumnya dan bidang pendidikan pada khususnya. Hal inilah yang menjadi landasan bagi terwujudnya sumber daya manusia unggulan sebagai modal utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan modal utama guna mencapai tujuan pendidikan, yakni: Terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, jujur, berwibawa dan bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Untuk itulah, sumber daya manusia sebagai capital intelektual yang didukung adanya skill, knowledge, dan ability akan tetap berkembang dan eksis dalam menghadapi perubahan yang multidimensional khususnya dalam bidang pendidikan.

Dalam proses pengembangan pendidikan baik secara formal, in formal, dan non formal maka setiap manusia dituntut untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan in formal merupakan pendidikan yang utama dan pertama yang terjadi pada setiap individu. Hal ini dikarenakan pendidikan in formal terjadi

di lingkungan keluarga. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya: kursus-kursus. Sedangkan pendidikan formal adalah: pendidikan yang dimulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi.

Dari pendidikan formal atau sekolah inilah, maka setiap manusia baik itu kepala sekolah, para guru, pegawai, dan peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, baik dari segi keterampilan, pengetahuan, dan kemampuannya. Sehingga dengan demikian sekolah akan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkannya.

Sekolah akan mengalami kemandegan bahkan pembubaran apabila tidak mampu menangkap dinamika yang berkembang baik internal maupun eksternal dari sekolah tersebut. Dalam konteks yang demikian inilah sumber daya manusia yang menempati posisi sentral, eksistensinya dalam pendidikan merupakan penentu suksesnya penyelenggaraan pendidikan secara holistik.

Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan yaitu: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa sebagai lembaga pendidikan Khusus tertua menampung anak dengan kelainan yang sama. Sekolah Luar Biasa Tunanetra, Sekolah Luar Biasa Tunarungu, Sekolah Luar Biasa Tunagrahita, Sekolah Luar Biasa Tunadaksa, Sekolah Luar Biasa Tunalaras, dan Sekolah Luar Biasa Tunaganda. Sedangkan Sekolah Dasar Luar Biasa menampung

berbagai jenis anak berkebutuhan khusus, sehingga di dalamnya memungkinkan terdapat anak tunanetra, anak tunarungu, anak tungrahita, anak tunadaksa, dan atau anak tunaganda. Sedangkan Pendidikan Terpadu adalah sekolah luar biasa yang juga menampung anak berkebutuhan khusus dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, kegiatan pembelajaran yang sama. Namun perkembangannya selama ini kurang menggembirakan yang dikarenakan banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus.

Pada umumnya, lokasi Sekolah Luar Biasa berada di kota-kota, sementara keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebar di seluruh pelosok nusantara. Akibatnya sebagian besar anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena lokasi sekolah yang sulit dijangkau. Sebagian lagi anak-anak berkebutuhan khusus dapat diterima di Sekolah Dasar terdekat, tetapi karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, berakibat mereka tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 tentang Pendidikan Khusus menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa (2004:v) menyatakan: pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu:

1. Pendidikan inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak.
2. Pendidikan inklusif berarti memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar.
3. Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak kecil yang hadir di sekolah, berpartisipasi dalam mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.
4. Pendidikan inklusif diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, esklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama dengan anak pada umumnya guna mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itulah dengan adanya pendidikan inklusif memberikan kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah regular yang terdekat. Tentu saja sekolah regular terdekat pun harus dipersiapkan segala sesuatunya. Artinya sekolah inklusi harus benar-benar mempersiapkan semua komponen-komponen yang diperlukan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai yang dinginkan.

Kepala Sekolah sebagai penentu kebijakan dalam sebuah sekolah mempunyai tanggungjawab yang lebih berat dan luas. Sebuah sekolah adalah organisasi yang komplek dan unik, sehingga memerlukan koordinasi yang tinggi. Oleh karena itu kepala sekolah yang berhasil yaitu tercapainya tujuan sekolah dan tujuan dari pada individu-individu yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Kepala Sekolah harus mampu memahami dan mengusai perannya, sebagai pucuk pimpinan dalam sekolah tersebut.

Dalam dunia pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolah tersebut. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Hal yang serupa diungkapkan Supriadi (1998:346) bahwa: erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik.

Di samping itu kepala sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 (Mulyasa, 2005: 25) bahwa: Kepala sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kegiatan administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Di samping itu Mulyasa (2005) juga menyatakan bahwa fungsi dan peran kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator. Sebagai edukator kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, menciptakan iklim yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada tenaga kependidikan, dan melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Sebagai manajer kepala sekolah harus mampu merencanakan,

melaksanakan, dan mengontrol para anggotanya serta mendayagunakan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai administrator kepala sekolah harus memiliki kemampuan mengelola kurikulum, mengelola administrasi kesiswaan, mengelola adminstrasi personalia, mengelola administrasi pendanaan, mengelola administrasi sarana dan prasarana, dan mengelola administrasi kearsipan.

Apalagi dengan adanya pendidikan inklusif yang belum lama bergulir di Indonesia ini. Kepala sekolah harus mampu memahami, mensosialisasikan, dan mengaktualisasikan pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan di sekolah dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tritamanti (2005) menyatakan: kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, mengkoordininasikan, mengevaluasi, dan tindaklanjut tentang program sekolah yang terkait dengan pendidikan inklusif. Asmara (1984) dalam penelitiannya menyimpulkan: "efektifitas kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru dan kepala sekolah dapat digolongkan secara kualitatif ke dalam taraf sedang. Ini mengandung arti bahwa belum seluruh tindakan kepemimpinan kepala sekolah dapat dijalankan seperti yang diharapkan".

Pada studi pendahuluan di Sekolah Dasar "T",yakni: pertengahan pebruari 2006 ibu "Y" mengatakan "saya mendengar tentang pendidikan inklusif dari bapak kepala sekolah ketika rapat dan itupun baru sekali, sehingga saya kurang jelas tentang pendidikan inklusif tersebut". Lebih lanjut ibu "Y" mengatakan "di kelas yang saya ajar ada dua siswa kelainan saya juga bingung bagaimana memberi

pelayanan kepada mereka, jadi modifikasi kurikulum yah... saya perkirakan dengan kemampuan siswa aja dan sarana prasarana juga kurang pak". Sedangkan studi pendahuluan, tanggal 21 pebruari 2006 di Sekolah Dasar "G", ibu "P" mengatakan: "saya mendengar ibu kepala sekolah menjelaskan pendidikan inklusif pada waktu rapat yang pada intinya bahwa pendidikan inklusif menangani anak cacat yang sekolah di sini". Sedangkan dalam pembelajaran ibu "P" mengatakan: "wah untuk kurikulum yang disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, alat-alat atau fasilitas yang digunakan saya belum tahu pak, karena saya belum pernah mengikuti pelatihan dan ibu kepala sekolah belum memberitahu juga".

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada dua Sekolah Dasar, yakni: Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" di Kota Bandung Jawa Barat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada dua Sekolah Dasar, yakni: Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" yang kedua-duanya berlokasi di Kota Bandung Jawa Barat. Fokus penelitian tersebut dikelompokan menjadi empat bagian yaitu:

a. Upaya kepala sekolah dalam merencanakan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

b. Upaya kepala sekolah dalam pelaksanaan pengembangaan pendidikan inklusif di sekolah.

c. Upaya kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah.

d. Upaya kepala sekolah dalam menindaklanjuti pengembangan pendidikan inklusif di sekolah.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dikembangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam merencanakan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah?

1) Bagimanakah merencanakan sosialisasi pendidikan inklusif?

2) Bagaimanakah perencanaan kurikulumnya?

3) Bagaimanakah perencanaan kesiswaannya?

4) Bagaimanakah perencanaan tenaga kependidikan?

5) Bagaimanakah perencanaan pendanaannya?

6) Bagaimanakah perencanaan sarana prasarananya?

7) Bagaimanakah perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat?

8) Bagaimanakah mekanisme dalam menyusun perencanaan?

9) Siapa saja yang terlibat dalam menyusun perencanaan tersebut?

10) Apakah ada hambatan yang dihadapi?

11) Bagaimanakah mengatasi hambatan tersebut?

b. Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah?

1) Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusif?

2) Bagaimanakah pelaksanaan kurikulumnya?

3) Bagaimanakah pelaksanaan kesiswaannya?

4) Bagaimanakah pelaksanaan tenaga kependidikan?

5) Bagaimanakah pelaksanaan pendanaannya?

6) Bagaimanakah pelaksanaan sarana prasarananya?

7) Bagaimanakah pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat?

8) Bagaimanakah pembentukan struktur organisasi?

9) Bagaimanakah perincian tugas-tugasnya?

10) Siapakah yang melaksanakan tugas-tugas tersebut?

11) Apakah ada hambatan yang dihadapi?

12) Bagaimanakah cara mengatasi hambatan tersebut?

c. Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam mengontrol pengembangan pendidikan inklusif di sekolah?

1) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklousif?

2) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan kurikulum?

3) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan kesiswaan?

4) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan tenaga kependidikan?

5) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan pendanaan?

6) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan sarana dan prasarana?

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERPUSTAKAAN

7) Bagaimanakah mengontrol pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat?

8) Apakah ada hambatan yang dihadapi?

9) Bagaimanakah cara mengatasi hambatan tersebut?

d. Bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam menindaklanjuti pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya?

1) Bagaimanakah menindaklanjuti sosialisasi pendidikan inklusif?

2) Bagaimanakah menindaklanjuti kurikulum?

3) Bagaimanakah manindaklanjuti kesiswaan?

4) Bagaimanakah menindaklanjuti tenaga kependidikan?

5) Bagaimanakah menindaklanjuti pendanaan?

6) Bagaimankah menindaklanjuti sarana dan prasarana?

7) Bagaimanakah menindaklanjuti hubungan sekolah dengan masyarakat?

8) Apakah ada hambatan yang dihadapi?

9) Bagaimanakah mengatasi hambatan tersebut?

C. Konsep Dasar

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada dua sekolah dasar ini, maka diperlukan penjelasan beberapa konsep secara konkrit. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan utama di atas maka terdapat konsep-konsep sebagai berikut:

1. Upaya adalah segala daya dan usaha untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau lebih maju jika dibandingkan dengan keadaan yang sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), bahwa "upaya adalah usaha, ikhtiar uantuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya".
2. Pendidikan inklusif menurut pernyataan Salamanca dan kerangka aksi tentang pendidikan kebutuhan khusus (1994), bahwa: pendidikan inklusif berarti sekolah merekomendasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya...Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak-anak yang berasal dari populasi terpencil atau pindah-pindah, anak daari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari kelompok yang kurang beruntung atau marginalisasi.

Berdasarkan konteks di atas maka upaya kepala sekolah dalam pengembangan inklusif dapat diaplikasikan melalui:

1. Perencanaan maksudnya bagaimana upaya kepala sekolah dalam merencanakan sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan maksudnya bagaimana upaya kepala sekolah dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan baik itu sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pendanaan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

3. Mengontrol maksudnya bagaimana upaya kepala sekolah dalam mengontrol pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan baik itu sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
4. Tindaklanjut maksudnya bagaimana upaya kepala sekolah dalam menindaklanjuti apa yang telah dicapai baik itu sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendpatkan gambaran tentang upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif pada dua Sekolah Dasar di Kota Bandung Jawa Barat. Secara khusus peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana kepala sekolah merencanakan sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.
b. Mengetahui bagaimana kepala sekolah melaksanakan sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat.

c. Mengetahui bagaimana kepala sekolah mengontrol pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat.

d. Mengetahui bagaimana kepala sekolah menindaklanjuti sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Memberikan masukan bagi kepala sekolah dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan tindaklanjut yang meliputi: sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusif di sekolahnya.

b. Memberikan masukan bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk membantu kepala sekolah dalam upaya pengembangan pendidikan inklusif di sekolah.

c. Memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Propinsi/Kota untuk memfasilitasi dan membina sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif.

d. Memberikan masukan bagi pusat sumber untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam memberikan bantuan guru pembimbing khusus.

e. Memberikan masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk meneliti fenomena yang lebih mendalam lagi terhadap pengembangan pendidikan inklusif di Sekolah.

E. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Hal ini peneliti pilih karena peneliti berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan Nasution (1988:18), yang menyatakan bahwa: "penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya". Dengan pendekaatan kualitatif peneliti berusaha mengungkap secara deskriptif bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan tindaklanjut terhadap sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana dan prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat dalam upaya pengembangan pendidikan inklusi di sekolahnya.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Adapun alasan penggunaan studi kasus adalah peneliti berusaha mengungkap fenomena upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan pendapat Yin (2004), bahwa: "studi kasus berusaha menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata dimana batas fenomena dan konteks tidak tampak jelas dan multi sumber bukti dimanfaatkan".

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengungkap upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan tindaklanjut terhadap sosialisasi pendidikan inklusif, kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, pendanaan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

2. Observasi

Observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung kondisi sekolah yang berkaitan dengan upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar, dimana peneliti mengadakan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan upaya kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan inklusif.

F. Lokasi dan Informan Penelitian

Lokasi penelitian adalah dua Sekolah Dasar, yakni: Sekolah Dasar "T" dan Sekolah Dasar "G" yang keduanya berlokasi di Kota Bandung Jawa Barat. Dengan harapan peneliti dapat mengambil hal-hal yang bersifat esensial dalam pengembangan pendidikan inklusif dari kedua sekolah tersebut.

Informan yang peneliti gunakan adalah: Kepala Sekolah sebagai informan utama dan ditunjang oleh informan lainnya, yakni: guru, tata usaha, siswa, dan komite sekolah/orang tua siswa.